

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BATUPADAS
DENGAN SISTEM BAGI HASIL

(Studi Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SI dalam Ilmu Syariah

Oleh

MAULIDA ISMALIA
NPM 1621030390

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



Pembimbing I
Pembimbing II

: Dra. Firdaweri, M.H.I.
: Juhtratul Khulwah, M.S.I

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020M

ABSTRAK

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Mengenai masalah jual beli, maka harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli itu sendiri, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah terjadi jual beli batu padas dengan sistem bagi hasil, di awal pelaksanaan akad tidak disebutkan persentase bagi hasil dari penjualan batu padas, setelah selesai penjualan dari batu padas, pemilik tanah mendapatkan 30% dari hasil penjualan batu padas, dan yang membeli batu padas mendapatkan 70% dari penjualan batu padas tersebut. Dalam hal ini tidak disebutkan dalam perjanjian di waktu akad, oleh sebab itu pemilik tanah merasa dirugikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana praktik jual beli batu padas dalam sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli batu padas dengan sistem bagi hasil di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mungkin bagaimana praktik jual beli batu padas dalam sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan untuk mengetahui sejauh mungkin perspektif hukum Islam tentang praktik jual beli batu padas dalam sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana hasil penelitiannya berupa uraian kalimat. Karena dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli batu padas dengan sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terjadinya praktik jual

beli batu padas dalam sistem bagi hasil di lakukan oleh pihak pembeli dan penjual yaitu menggunakan *syirkah mudharabah*, dimana hasil penjualan keseluruhan dari batu padas tersebut dibagi 70%-30%. Transaksi jual beli dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah di pandang tidak sah karena syarat objek dalam jual beli tidak terpenuhi. Seharusnya, ketetapan harga di sebutkan di awal perjanjian dalam jual beli, walaupun dari segi objek dan pihak yang berakad sudah memenuhi rukun dalam jual beli.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulida Ismalia

NPM : 1621030390

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Padas Dengan Sistem Bagi Hasil (Studi Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 November 2020

Penulis

Maulida Ismalia

NPM.1621030390



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : "TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
BATU PADAS DENGAN SISTEM BAGI HASIL".**

Nama : Maulida Ismalia

NPM : 1621030390

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam ividing Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dra. Firdaweri, M.H.I
NIP. 195509191982032004

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I
NIP. 199107092018012002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BATU PADAS DENGAN SISTEM BAGI HASIL (Studi di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)**, disusun oleh: **Maulida Ismalia, NPM 1621030390**, Jurusan Muamalah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal Senin/21 Desember 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I

(.....)

Sekretaris : Anis Sofiana, M.S.I

(.....)

Penguji 1 : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M

(.....)

Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I

(.....)

Penguji III : Juhrotul Khulwah, M.S.I

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H

NIP. 196210219930310002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Wahai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.

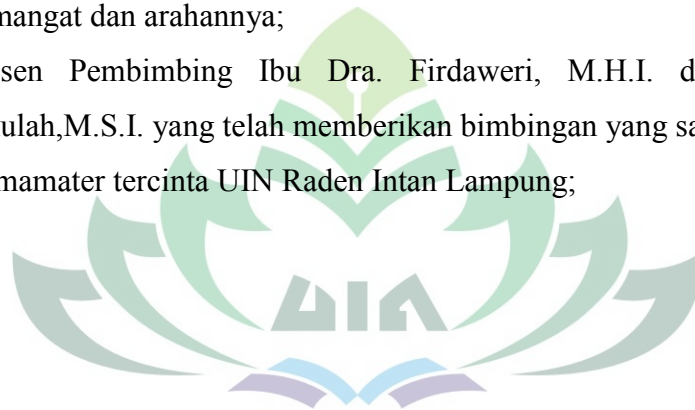
(QS. An-Nisa (4): 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

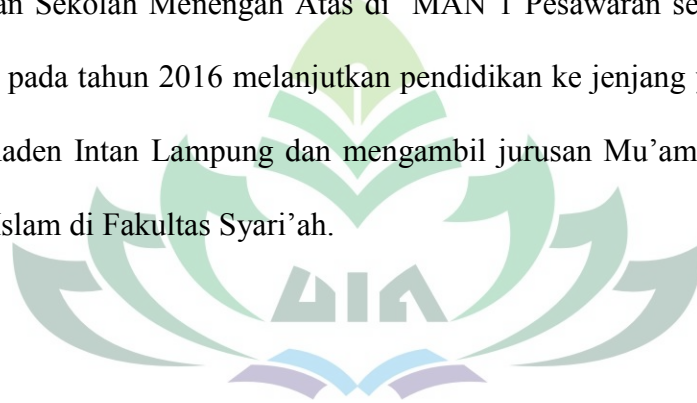
1. Ayahandaku Isa Anshori dan Ibundaku Zainab yang telah sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Kakakku tercinta Ihsanuddin, Fauzan Efendi, Sri Handayani serta ponakanku tersayang Mauzati Faiha Syakira yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa;
3. Nenek ku tersayang Baihillah yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan arahannya;
4. Dosen Pembimbing Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I. dan Ibu Juhratul Khulah, M.S.I. yang telah memberikan bimbingan yang sangat baik;
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;



RIWAYAT HIDUP

Maulida Ismalia lahir di Pekon Susuk, Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 30 Maret 1997, anak ketiga (bungsu) dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Isa Anshori dan Ibu Zainab.

Riwayat Pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 1 Pekon Susuk pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Kelumbayan selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Pesawaran selesai tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, di IAIN Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.



Bandar lampung, 30 November 2020

Penulis,

Maulida Ismalia

NPM. 1621030390

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Padas Dengan Sistem Bagi Hasil (Studi Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah), dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (SI) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Bapak Khairuddin, M.S.I selaku ketua jurusan muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku seketaris jurusan muamalah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I. selaku pembimbing I dan ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
6. Semua nara sumber, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini;
7. Sahabat-sahabatku tersayang Okta Liana, Anggi Marsely, Gustina Zulva, Salem Relandy, Siti Nurhasanah dan Indra Mu'thi Ali, Sitta Rosyida Azhar;
8. Sahabat Holly ku Santi Ajie, Asma Wana, Zaujah Nilam Suri dan Perisaputra, yang telah meluangkan waktu untuk selalu mendengarkan keluhan kesah ku dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Mu'amalah angkatan 2016 terutama Mu'amalah H



Bandar Lampung, 30 November 2020

Penulis,

Maulida Ismalia

NPM. 1621030390

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikasi Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Jual Beli.....	14
a. Pengertian Akad dan Jual Beli	14
b. Dasar Hukum Jual Beli	17
c. Macam – macam Jual Beli	21
d. Rukun Dan Syarat Jual Beli	29
2. Pengertian Musyarakah	34
a. Pengertian musyarakah	34
b. Rukun dan syarat Musyarakah	40
c. Macam-macam Musyarakah	43
B. Tinjauan Pustaka	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Sejarah Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah	52
B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Batu Padas Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah	56

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Jual Beli Batu Padas Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah	69
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Padas Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah	70
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Surat izin riset
2. Surat keterangan wawancara
3. Daftar pertanyaan wawancara
4. Blangko konsultasi skripsi



DAFTAR TABEL

Tabel

1. Nama-Nama Kepala Kampung Sejak Berdirinya Kampung	52
2. Sejarah Pembangunan Tengah Desa Sangun Ratu	53
3. Pembagian Wilayah Desa Sangun Ratu.....	57
4. Tingkat Pendidikan Desa Sangun Ratu.....	60
5. Pemilik Lahan Pertanian	61
6. Prasarana Kampung Sangun Ratu.....	62
7. Struktur Organisasi	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul. Di samping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Padas Dengan Sistem Bagi Hasil” Studi di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam
 - a. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
 - b. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perubahan hamba yang terkandung pada sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.² Dasar hukum umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah maka dari itu kita harus

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Keempat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1060

²Buyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta : Kreasi Total Media , 2016), h.11

mengetahui dasar hukum tersebut dan memahami sunnah-sunnah yang terkandung didalamnya.³

Jadi, yang di maksud dengan tinjauan hukum Islam yaitu, seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rosul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.

2. Jual Beli Batu Padas

- a. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴

Jual beli menurut pengertian lughawinya dan *asy syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.

Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut syari'at jual beli ialah pertukaran harta, atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵

- b. Batu padas adalah lapisan tanah yang keras menyerupai karang. Batu padas berasal dari kata dasar Batu.⁶

³Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Pers: 2005), h.200

⁴*Ibid*, h, 589

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Penerjemah: Asep Sobari, et.al, (Bandung : PT AL-Ma'arif, 1997), h.263

⁶Arti Batu Padas “ (Online), tersedia di : <https://lektur.id/arti-batu-padas/> (20 April 2020).

Dengan demikian yang di maksud dengan jual beli batu padas yaitu suatu transaksi jual beli batu padas yang dimana kedua belah pihak menyetujui dan didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.

3. Sistem Bagi Hasil

Sistem Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

Yang dimaksud dari judul skripsi ini secara keseluruhan adalah pandangan Hukum Islam mengenai Praktik Jual Beli Batu Padas dengan Sistem Bagi Hasil, penelitian ini di lakukan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan mendasar dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Alasan Objektif
 - a. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Terbatasnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum jual beli.
2. Alasan subjektif
 - a. Pembahasan judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penyusunan pelajari di jurusan muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

- b. Tersedianya *literatur* yang menunjang untuk membahas masalah yang penulis teliti, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah terjadi transaksi jual beli padas dengan sistem bagi hasil dimana orang yang membeli batu padas tersebut, melakukan pembayaran di akhir setelah selesainya penggalian batu padas, sedangkan pada akad perjanjian di awalnya yaitu transaksi yang di gunakan menggunakan akad jual beli, namun pelaksanaannya menggunakan akad bagi hasil (*musyarakah mudharabah*) dimana pembayaran dilakukan diakhir setelah selesainya penggalian batu padas tersebut, dengan bagi hasil si pemilik tanah mendapatkan 30% dan yang membeli batu padas mendapatkan 70% dari hasil penjualan batu padas tersebut dan praktik seperti ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

Jual beli merupakan akad yang umum di gunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu

dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli.⁷

Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum- hukum dan aturan – aturan jual beli itu sendiri seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal – hal yang berhubungan dengan jual beli sah dan tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*.

Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁸ Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan hukum Islam untuk mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harga.⁹ Sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi antar manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta.

Pembayaran yang di gunakan dalam pembahasan ini ialah Jual Beli Batu Padas dengan Sistem Bagi Hasil. Jual beli adalah perjanjian tukar

⁷Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h,69.

⁸M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h, 53.

⁹Mardhani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h, 101.

menukar barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan syara'. Oleh karena itu Allah berfirman: (Q.S AnNisa (4): 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ! تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذْ أَنْ تَكُونُ

تِجَارَةً ذَنْ أَضْرَ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada kamu. (Q.S AnNisa (4): 29).”

Dalam teori sistem bagi hasil atau *mudharabah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka praktik *mudharabah* akan batal dan rusak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BATU PADAS DENGAN SISTEM BAGI HASIL” (Studi di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu hanya berfokus mengenai akad Jual Beli Batu Padas dengan Sistem Bagi Hasil dan bagaimana tinjauan Hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Dari pemaparan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah – masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli batu padas dengan sistem bagi hasil yang di terjadi di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad jual beli batu padas dengan sistem bagi hasil di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli batu padas dalam sistem bagi hasil yang di lakukan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang jual beli batu padas dalam sistem bagi hasil yang di lakukan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

G. Signifikan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menambah informasi tentang bagaimana syarat pelaksanaan jual beli batu padas yang baik dan benar di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk menambah wawasan tentang bagaimana jual beli yang baik menurut hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep analisa hukum Islam tentang jual beli batu padas dengan sistem bagi hasil. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang di angkat untuk diteliti.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peristiwa yang terjadi tentang jual beli batu padas dengan sistem bagi hasil di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁰Kartini Kartono, *Penghantar Metodologi Riset Sosial*, Cetke-IV, Maju Mundur, (Bandung, 2008), h, 137.

3. Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sumber data merupakan subjek dari sumber penelitian, sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh secara langsung dari responden atau objek penelitian yang ada di lapangan.¹¹ Data primer dalam studi lapangan di dapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari penjual dan pembeli batu padas di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang di kumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang di peroleh peneliti dari buku – buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitian juga disebut populasi atau sensus.¹² Adapun populasi yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik tanah dan 5 orang penjual dari batu padas.

5. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹³ Untuk menentukan ukuran sampel, penulis menggunakan rumus sampel yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Maka dalam hal ini sampel dalam penelitian ini diambil dari 1 orang pemilik tanah, 5 orang pembeli batu padas.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁴

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h, 102.

¹³*Ibid*, h, 108.

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h, 137.

menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁵ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik jual beli batu padas dengan sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam.

b. Wawancara(*Interview*)

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁶ Wawancara dilakukan guna untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut.

7. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* adalah pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.
- b. *Koding* adalah mengklarifikasikan jawaban – jawaban dari para responden ke dalam kategori – kategori.¹⁷
- c. Sistematisasi data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal – hal yang akan di tulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

8. Metode Analisis Data

¹⁵Moh Nazir, *Metode Penelitian*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h, 154.

¹⁶*Ibid.*, h, 166.

¹⁷Cholid Narbuka, Abu Achmadi, *Metode – metode Penelitian*, Cet.ke-10 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h, 155.

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan hukum Islam tentang jual beli batu padas dengan sistem bagi hasil yang akan dikaji menggunakan Metode Kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli batu padas di desa sangun ratukecamatanpubiankabupatenlampungtengah. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, yaitu agar memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli padas dengan sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah – kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang di selidiki.¹⁸ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktik jual beli batu padas di tinjau dari hukum Islam. Hasil analisis yang di tuangkan dalam bab- bab keseluruhannya dirumuskan dalam sistematika pembahasan penelitian ini.

¹⁸Kaelen, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Paradigma: Yogyakarta, 2015), h, 58.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata (*ba'a*).jual beli (*al- bai*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹ Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).²

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai*, *al- Tijarah*, dan *al- Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman:



Artinya : “ Sesungguhnya orang – orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al- Qur’an dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugrahkan kepadanya dengan diam – diam dan terang – terangan, mereka mengharapkan *tijarah* (Perdagangan) yang tidak akan merugi.” (Q.S. Fatir: 29).³

Secara terminologi beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing- masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

²Sulaiman Ahmad Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009), h. 750

³ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 47

dengan: “ Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan,” atau, “ memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.” Hanabilah mendefinisikan jual beli ialah: “ Pengertian jual beli syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.⁴

Pengertian secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang membahas tentang istilah jual beli, seperti diantaranya:

a. Ulama *Syafi’iyah*

Dalam kitab *Figh al- Syafi’iyah* jual beli diartikan sebagai tindakan untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

b. Ulama *Hanafiyah*

Ulama *Hanafiyah* mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

c. Ulama *Malikiyah*

Ulama *malikiyah* mendefinisikan jual beli ke dalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

⁴Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah XII*, Alih Bahasa Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma’arif, 1998), h. 45

⁵*Ibid*, h. 25

1) Jual beli dalam arti umum

Ialah suatu perikatan tukar – menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sesuatu yang bukan manfaat dalam hal ini merupakan benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus

Ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat- sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah dipahami bahwa jual beli tersebut lebih menekankan pada tukar menukar harta dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain, tukar menukar harta disini dapat berupa pertukaran barang dengan uang. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Jual beli yang sekarang sangat berbeda dengan jual beli yang terjadi pada masyarakat primitif. Jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat primitif adalah dengan cara tukar menukar barang dengan barang (harta). Tukar menukar barang pada zaman primitif

ini pada saatnya sekarang disebut juga dengan istilah barter. Misalnya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia dalam jumlah yang amat besar.

Dengan demikian kesimpulan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dimiliki seseorang, yang mana penukaran barang ini dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' atau tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.⁶ Hal ini berdasarkan atas dalil – dalil yang terdapat di dalam Al- Qur'an, Al- Hadist, ataupun Ijma' ulama' adalah sebagai berikut.

1) Al- Qur'an

Hukum melakukan jual beli adalah boleh (*Jaiz*) atau (*Mubah*), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.

Al- Baqarah (2) ayat 275:

⁶Abdul Rahman Ghazali, et al. *Figh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 66

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Orang – orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁷

Surat An- Nisaa’ (4) ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (Q.S An- Nisaa’ ayat:29).⁸

Ayat di atas memberikan gambaran penegasan bahwa Allah

SWT melarang manusia dari memakan harta sesama mereka

dengan cara yang batil, seperti melakukan upaya menipu, menyuap,

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.193

⁸ Tim Penyusun, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid II* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 420

berjudi, menimbun barang – barang kebutuhan pokok untuk dapat menaikkan harganya dikemudian hari dan beberapa perbuatan lain yang dilarang termasuk di dalamnya seperti melakukan riba, serta sebagai pemukanya adalah riba.⁹

2) As – Sunnah

Hukum jual beli juga di jelaskan pada hadist Rasulullah S.A.W, ialah hadist Rifa'ah bin Afi' yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَفِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجَالِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّهَ الْحَاكِمُ)¹⁰

Artinya :“ Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a, Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, Nabi berkata: Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.”(Diriwayatkan oleh Badzar dan di shohihkan oleh Hakim).

3) Ijma'

Ijma' berarti sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksudkan dengan ijma' ialah:Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.¹¹

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-

⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid II* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 342

¹⁰ Wati Susiawati, “ Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (November 2017), h. 174

¹¹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Terj), Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 64.

masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip mu'amalah yaitu:¹²

- a) Prinsip kerelaan
- b) Prinsip bermanfaat
- c) Prinsip tolong menolong
- d) Prinsip tidak terlarang

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan perdagangan yang dalam hal ini tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan.

c. Macam – Macam Jual Beli

1) Dilihat dari segi hukumnya

Menurut hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil*, dan *fasid*.

¹²Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 144.

- a) Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat – sifatnya terpenuhi rukun – rukun dan syarat – syarat menurut tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar didalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli.
 - b) Jual beli *bhatil*, yaitu jual beli yang tidak di syariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Akad jual beli *bathil* ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.
 - c) Jual beli *Fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya namun sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (ahliyah) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.¹³
- 2) Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

¹³Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.71

- a) Jual beli benda yang kelihatan
- b) Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat – sifatnya dalam janji.
- c) Jual beli benda yang tidak sah

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada di tempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat – sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan), menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang – barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

- 3) Jual beli ditinjau dari segi *akid* (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.¹⁴
- 4) Dilihat dari segi objeknya diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam yaitu:
- a) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lainnya.
 - c) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli pertukaran anatara barang dengan barang (barter), atau pertukaran barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- 5) Dilihat dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam yaitu:

¹⁴Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75-77

- a) Jual beli *musawwamah* (Tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- b) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberikan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga macam, yaitu:
 - (1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - (2) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - (3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'I bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
- d) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran

pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

6) Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

b) Jual beli dengan pembayaran tertentu (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

c) Jual beli penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), yaitu:

(1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

(2) Jual beli *istishad*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufajtur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama – sama tertunda.¹⁵

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- (1) Jual beli yang menguntungkan (*al- Murabbahah*).
- (2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at- tauliyah*)
- (3) Jual beli rugi (*al- khasarah*)
- (4) Jual beli *al- musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul “ *FighAl- Iman Ja’far ash- Shadiq ‘Ardh wa Istidlal* juz 3 dan 4”, bahwa jual beli terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a) Jual beli *Fudhuli*, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.

¹⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.175

- b) Jual beli *Nasi'ah*, yaitu barang yang diperjualbelikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
- c) Jual beli *Salam*, yaitu harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikannya jual beli *Nasi'ah*).
- d) Jual beli *ash-Sharf*, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
- e) Jual beli *Murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
- f) Jual beli *Muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
- g) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.¹⁶

Adapula macam – macam jual beli yang dilarang oleh agama Islam namun sah hukumnya dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa, jual beli yang dimaksud yaitu jual beli sebagai berikut:

- (1) Menemui orang – orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda – bendanya dengan

¹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *FighAl- Iman Ja'far ash- Shadiq 'Ardh wa Istidlal* juz 3 dan 4, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), h. 46

hargayang semurah- murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi – tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar – pasar yang beralokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampong. Tapi bila orang kampong sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa- apa.

(2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “ Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”.

(3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing – mincing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

(4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “ kembaliksaja barang itu kepada penjualannya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

d. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi *syarat* dan *rukun* jual beli. Rukun jual beli adalah adanya *ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* tidak diwajibkan

jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqis*), tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa *ijab qabul*) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁷

Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan *ijab qabul*, kecuali untuk barang – barang kecil maka tidak wajib dengan *ijab qabul*, tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling member) saja. Dan hal ini merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. *Ijab* dan *qabul* tidak mewajibkan kata-kata tertentu, sebab yang menjadi ukuran dalam jual beli adalah akad dan tujuannya, bukan kata-kata dan bentuknya.¹⁸

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* adalah ungkapan member dari pembeli, dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁹ Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dihindari sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi

¹⁷Sulaiman Ahmad Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Figh Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2013), h.750-751

¹⁸Sayyid Sabiq Diterjemahkan Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Kitab Fiqih Sunnah*, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), h.595

¹⁹Rachmat Syafe'I, *Figh Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2001), h. 75-76

yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²⁰

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:²¹

- a) Ada orang yang melakukan akad atau *al- Muta'qidain*(penjual dan pembeli)
- b) Adanya *shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c) Adanya barang yang di perjualbelikan
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang.

2) Syarat Jual Beli

Syarat jual beli terbagi menjadi dua bagian, pertama terkait dengan pelaku akad, kedua terkait dengan barang yang diperjualbelikan.

- a) Syarat jual beli yang terkait dengan pelaku akad diantaranya adalah:

- 1) Berakal
- 2) *Mumayyiz* (dapat membedakan antara salah dan benar).

Dimana anak kecil yang *mumayyiz* dibolehkan melakukan akad jual beli dengan syarat memerlukan izin walinya.

²⁰Nasrun Haroen, *Figih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.7

²¹*Ibid.*, h.115

b) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Ijab adalah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian...” *Qabul* adalah perkataan pembeli, seperti “saya beli dengan harga sekian...”²²

Ijab qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab “*Al- Aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “*Al-Ittifaq*” secara terminologi *figh*, akad didefinisikan dengan:

“Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.”²³

Maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Seperti kesepakatan untuk melakukan *riba*, menipu orang lain, yang pada akhirnya pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain, suatu akad akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

c) Syarat tentang objek yang diperjualbelikan

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang

²²Sudarsono, *Pokok – pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), h.401

²³*Ibid.*, h.97

dijadikan sebagai objek terjadinya jual beli ini haruslah memenuhi syarat – syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai).

(1) Bersih barangnya

Ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

(2) Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud ialah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama (Syariat Islam).

(a) Milik orang yang melakukan akad

Yang dimaksud, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

(b) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang diadakannya sebagai objek jual beli sesuai

dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

(c) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah.

(d) Barang yang diakadkan ada di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

2. Konsep Dasar *Musyarakah*

a) Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing – masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.²⁴ Sedangkan menurut syara' *musyarakah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja

²⁴Ghufron A. Mas'adi, *Figh Muamalah Kontekstual*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191

dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁵ *Syirkah* atau *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.²⁶

Secara Harfiah makna *syirkah* adalah penggabungan pencampuran atau serikat, sedangkan pengertian *syirkah* dapat di definisikan sebagai akad perjanjian antara orang – orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, sedangkan M. Syafi’I Anwar dalam sebuah tulisannya pada majalah ulumul Qur’an merumuskan sebagai berikut:

“perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Resiko rugi atau laba di bagi secara berimbang dengan penyertaannya.²⁷

Secara figih,dalam kitabnya, as- Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy- Syaukani menulis sebagai berikut, (*Syirkah Syar’iyah*) terwujud (terealisasi) atas dsaar sama – sama ridha diantara dua orang atau lebih, yang masing – masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal

²⁵Nur Khoirin, *Mensoal Kesyari’ahan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang)*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010), h. 19

²⁶Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), h. 39

²⁷ Chairuman Pasaribu, Suwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.74

bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.²⁸

Musyarakah(*syirkah* atau *syarikah* atau *serikat* atau *kongsi*) adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang didalamnya terdapat bagi hasil dimana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama- sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Ketentuan dalam melakukan transaksi akad *musyarakah*:

²⁸Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Cet Ke- 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 96

- a) Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) kemitraan.
- b) Pihak – pihak yang berkontrak harus sadar hukum, dan memperhatikan hal – hal berikut:
 - 1) Setiap mitra harus menyediakan dana atau pekerjaan.
 - 2) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis.
 - 3) Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing – masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja.
 - 4) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri tanpa kesepakatan mitra lain.
- c) Objek akad adalah modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
- d) Tujuan akad adalah membangun usaha atau pekerjaan dengan kemitraan.

Jadi, dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing – masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah

berdiri maupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Aplikasinya dalam koperasi terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana koperasi membiayai sebagian saja dari jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar koperasi atau lembaga keuangan. Mengenai pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing – masing atau kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun ketika terjadi kerugian, maka dibebankan secara proporsional kepada masing – masing modal.

Ada beberapa aplikasi pembiayaan *musyarakah* bagi lembaga keuangan syariah, pertama *Musyarakah* permanen (*continous musyarakah*), dimana pihak koperasi merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun investasi surat – surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi lembaga keuangan syariah. Kedua, *Musyarakah* digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja (*working capital*). Lembaga keuangan syariah merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak lembaga keuangan syariah akan menyediakan

dana untuk membeli asset atau alat – alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan koperasi atas asset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *diminishing musyarakah*, dan ini yang banyak diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah. Ketiga, *musyarakah* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan – keperluan khusus nasabah lainnya.²⁹

b) Dasar Hukum *Musyarakah*

1) Al- Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٤﴾

Artinya : “ Dia (Daud) berkata, “ Sungguh dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang – orang yang bersekutu itu berbuat dzalim kepada yang lain, kecuali orang- orang yang

²⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 207-209

beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”(Qs. Shad :24).

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz “*al- khulata*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau *partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

Berdasarkan pemahaman ini jelas sekali bahwa pembiayaan *musyarakah* mendapatkan legalitas dari syariah.

2) Al- Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْنَبِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ
عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِיקَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ³⁰ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّهَ الْحَكِيمُ)

“Telah Menceritakan Kepada Kami, Muhammad bin Sulaiman al- Mishaishi mengatakan kepada kami, bahwa telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Zubair, Dia telah berkata dari Abi Hayyan al- Taini dari bapaknya dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman:” Aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku

³⁰Abi Thayyib Muhammad SyamsinAl- Chaq al- ‘Adhim Abadi dan Syamsudin Ibnu Qayyim al- Jauziyah, ‘*Aunul Ma’bud (Syarah Sunan Abi Dawud)*, (Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiyah, 1990), h. 169-170

keluar dari mereka.”(HR.Abu Daud Di Shohehkan oleh Hakim).

Merupakan dalil lain dibolehkannya *musyarakah*. Hadist ini merupakan hadist qudsi dan kedudukannya shahih menurut hakim. Dalam hadist ini Allah memberikan pernyataan bahwa dia akan bersama dua orang yang saling bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti, Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

3) Ijma'

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara 'ijma para ulama sepakat bahwa hukum *musyarakah* yaitu boleh. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya al- Mughni telah berkata: kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.³¹ Dalam konteks Indonesia, dasar legalitas *syirkah* dikuatkan dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 134-138.

c) Rukun dan syarat *Musyarakah*

a) Rukun *Musyarakah*

³¹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 96

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul. Baik berupa perbuatan maupun ucapan, '*Aqidhain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*), yaitu *baligh*, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Adapun objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan, modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagai mana menjadi tujuan *syirkah*, yaitu keuntungan.

b) Syarat *Musyarakah*

Beberapa syarat pokok *musyarakah* menurut Usmani (1998) antara lain:

1) Syarat akad

Ada empat syarat akad:

- (a) Syarat berlakunya akad (*In'iqod*)
- (b) Syarat sahnya akad (*Shihah*)
- (c) Syarat terealisikannya akad (*Nafadz*)

(d) Syarat lazim

2) Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal – hal berikut:

a) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.

b) Rasio / nisbah keuntungan untuk masing – masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang di peroleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

3) Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

a) Imam Malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

b) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari porsi modal yang disertakan.

- c) Imam Abu Hanifah, yang dikatakan sebagai pendapat tengah – tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.
- 4) Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
- 5) Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid.
- 6) Manajemen *musyarakah*. Prinsip normah dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*.
- 7) Penghentian *musyarakah*
- a) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.

- b) Jika salah seorang mitra meninggal dunia pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir atau dihentikan.
 - c) Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berhasil.
- 8) Penghentian *musyarakah* tanpa menutup usaha. Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri *musyarakah* sedangkan mitra lain ingin tetap meneruskan usaha, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama.³²

Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing – masing pihak harus di campur. Tidak diperbolehkan pemisahan dana dari masing – masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku, dan yang lain hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi Mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tuna, sedangkan Mazhab Hambali, tidak mensyaratkan pencampuran dana.

Partisipasi para mitra dan pekerjaan *musyarakah* adalah keputusan dasar. Tidak di benarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tidak akan ikut serta menangani pekerjaan

³²Ascarya, *Akad dan Prosduk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 52-58

dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara bersama, salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, serta berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

d) **Macam – macam *Musyarakah***

Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian:

1) *Syirkah Al- Amlak*

Syirkah al- amlak (syirkah milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*.³³

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah milik* adalah suatu *syirkah* dimana dua orang atau lebih bersama – sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.

Dalam akad *syirkah al- amlak*, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

a) *Syirkah al- jabr*

Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.³⁴ Dimana para pihak

³³Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.129

yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu asset tidak bisa menghindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut, karena memang sudah menjadi ketentuan hukum.

b) *Syirkah ikhtiyariyah*

Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang – orang yang berserikat. Perkongsian sukarela adalah kesepakatan dua prang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing – masing pihak.

2) *Syirkah Al- 'Uqud*

Syirkah al- 'uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko.

Syirkah al- 'uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

a) *Syirkah Mufawwadah*

Yaitu bahwa para mitra haruslah yang sudah dewasa, dana dari masing- masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan itu harus sama jumlahnya, masing – masing kemampuan dari para mitra

³⁴*Ibid.*, h. 130

untuk mengemban tanggung jawab dan menerima pembagian keuntungan dan memikul kerugian harus sama, masing – masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak. Dalam *fiqh* sunnah, disebutkan kesamaan itu sampai pada persoalan agama. *Syirkah* ini akan menjadi sah, jika semua pihak telah memenuhi kewajibannya secara penuh. Pada dunia usaha, model *syirkah* ini dapat dijumpai dalam pembentukan koperasi. Karena porsi modalnya sama, maka baik keuntungan maupun kerugian juga ditanggung bersama para pihak yang berserikat.³⁵

Sedangkan menurut Imam Malik, *syirkah* ini mempunyai sifat – sifat bahwa tiap – tiap pihak menegosiasi temannya akan tindakannya, baik waktu adanya kehadiran pihak atau tidak sehingga dengan demikian kebijaksanaan ada pada masing – masing pihak. Dalam negosiasi tidak di syaratkan adanya persamaan modal. Dan juga tidak pula ada syarat bahwa semua pihak tidak boleh menyisihkan hartanya sehingga masuk kedalam *syirkah*, (pendapat ini juga sama dengan pendapat Imam Hanafi, yaitu sama – sama membolehkan).

³⁵Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka SM, 2007), h. 40

b) *Syirkah Inan*

Yaitu dua orang bermitra dalam suatu urusan yang tertentu, tidak didalam seluruh harta mereka, umpamanya bermitra dalam membeli suatu barang. Hukum tersebut disepakati mujtahidin dan dibolehkan.³⁶ Pada bentuk *syirkah al – inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan presentasi modal yang diinvestasikan.³⁷

Dalam *syirkah inan*, masing- masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dalam bentuk asset atau kombinasi antara uang tunai dan asset atau tenaga.³⁸

c) *Syirkah Al- ‘Amal*

Syirkah al-‘amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk

³⁶Teungku Muhammad Hasbi As Shiddiqy, *Hukum- hukum Figh Islam, (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 389

³⁷Qamarul Huda, *Figh Muamalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 107

³⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h.177

menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang disebut dengan *syirkah abdan* atau *sanaa'i*.³⁹

d) *Syirkah Al- Wujuh*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja.

Syirkah ini misalnya dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa pemodal, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh adalah untuk mereka. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menganggap *syirkah* ini batal, sebab unsur modal dan kerja tidak terdapat didalamnya. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali mengemukakan bahwa *syirkah* ini dibolehkan, sebab dengan adanya tanggung jawab tersebut berarti sudah ada pekerjaan yang mereka lakukan.

³⁹*Ibid.*, h. 50

Sayyid sabiq memberikan definisi *syirkah al- wujuh* yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. *Syirkah* ini disebut juga *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal.

e) *Syirkah Mudharabah*

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.

Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.

Syarat- syarat *syirkah mudharabah* antara lain:

1. Modal harus dinyatakan dengan jelas mengenai jumlahnya.

2. Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.
3. Modal harus dalam bentuk tunai bukan utang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
5. Kesepakatan rasio persentase harus di capai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
6. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahibul mal*.⁴⁰

Syirkah al- Mudharabah (bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama sesuai kesepakatan), adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Menurut hanabilah, *mudharabah* dapat dikatakan *syirkah* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pihak – pihak berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil.
- b. Modal berbentuk uang tunai
- c. Jumlah modal harus jelas

⁴⁰. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 52

- d. Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu setelah disetujui.
- e. Pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu bukan dari harta yang lain.⁴¹

B. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti, ternyata tidak ditemukan hal – hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Terkait kualitas penelitian maka peneliti menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber – sumber penulisan. Oleh karena itu penulis akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan jual beli batu padas yang diangkat oleh peneliti. Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait jual beli batu padas , sebagai berikut:

Pertama, yang ditulis oleh Dewi Eka Lestari, pada tahun 2019, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Sidoarjo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam, yang mana jual beli batu gunung tersebut difokuskan pada akad jual belinya, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli batu gunung tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

⁴¹Abdul Rahman Ghazali, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 131

Kedua, yaitu ditulis oleh Kholili Zubaidillah, pada tahun 2015, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Dan Pasir Di Lahan Bengkok Desa (di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati),”. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam, yang mana pokok permasalahan dari kasus tersebut yaitu pemanfaatan jual beli batu sebagai gaji yang dilakukan oleh kepala desa yang berujung pada kerusakan lingkungan. Hasil penelitian ini sudah dianggap sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tetapi haram dilakukan karena menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan.

Ketiga, yaitu di tulis oleh Hafid, pada tahun 2018, dengan judul, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Urug (di Desa Alasraja Blega Bangkalan), penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam, dimana pokok permasalahannya dalam jual beli tanah urug tersebut terdapat kecurangan dalam hal takaran pada saat penjualan. Proses jual beli tanah urug tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan dari ketiga penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian penelitian tersebut berfokus pada praktik jual belinya saja, sedangkan pada penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Padas Dengan Sistem Bagi Hasil”, berfokus pada akad dari jual beli batu padas dalam pandangan hukum Islam. Jadi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

- Abi Thayyib Muhammad Syamsin Al- Chaq al- 'Adhim Abadi dan Syamsudin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, '*Aunul Ma'bud (syarah Sunnah Abi Daud)*', Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiyah, 1990.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Figh Al- Iman Ja'far ash- Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid II* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tim Penyusun, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid II* Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

B. Buku

- A. Mas'adi, Ghufon, *Figh Muamalah Kontekstual*, cet Ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuka, cet 10, *Metode – metode Penelitian*, Jakarat: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: MagistraInsania, 2004.
- Achmad Zaeni Diterjemahkan Dachlan, Sayyid Sabiq, *Ringkasan Kitab Fiqih Sunnah*, Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017.
- Al fauzan, Saleh, *fiqih sehari-hari*, jakarta: gema insani pers: 2005.
- Arifin, Zainal, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Pustaka Alvabet, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, akarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamil, Faturrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

- Djuwaini, Dimyaudin *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Huda, Qamarul *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Husain at-Tarigi, Abdullah Abdul, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta, 2004.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Kaelen, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma: Yogyakarta, 2015.
- Kartono, Kartini *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet, IV, Maju Mundur, Bandung, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Terj), Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Khoirin, Nur, *Mensoal Kesyarifan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang)*, Semarang:IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syarifah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardhani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moh Nazir, Ph D, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.

- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, cet Ke- 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Naja, Daeng, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yusitia, 2011.
- Nasrun Haroen, *Figih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Rasjid, Sulaiman, *Figh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Penerjemah: Asep Sobari, dkk, Bandung : PT AL- Ma'arif, 1997.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Shalihin, Buyana, *kaidah hukum islam*, Yogyakarta : kreasi total media, 2016.
- Sudarsono, *Pokok – pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi *Figh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Figh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Garis – Garis Besar Figh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Syafe'I, Rachmat *Figh Muamalah*, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2001.
- Teungku Muhammad Hasbi As Shiddiqy, *Hukum- hukum Figh Islam, (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Wahbah al- Zuhaily, Al- Figh al- Islami wa Adillah, *Figh al- Sunnah*, Jilid v, cet Ke-8, Damarkus: Dar al Fikr al- Mu'ashir, 2005.
- Yahya Al- Faifi, Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Figh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009.
- Yu'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

C. Jurnal

Susiawati, Wati, “Jual Beli dan dalam Konteks kekinian”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, November 2017.

D. Wawancara

Bapak Imam, Wawancara dengan penulis, di rumah Bapak Imam, Sangun Ratu, 21 Juli 2020

Bapak Subandi, Wawancara dengan penulis, di rumah Bapak Subandi, Sangun Ratu, 21 Juli 2020.

Semua data- data Desa bersumber dari arsip – arsip Desa yang penulis peroleh dari Kepala Desa Sangun Ratu, Bapak Sudiman , pada tanggal 21 Juli 2020.

E. Sumber Online

Arti Batu Padas “ (Online), tersedia di : <https://lektur.id/arti-batu-padas/> (20 April 2020).

Hikmah Jual Beli, (online), tersedia di : <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hikmah-jual-beli> , (17 Juni 2020).

